



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI**



2021

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA**

PROFESIONAL, ANDAL, AKUNTABEL



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kepada Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Kami dapat menyelesaikan Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kajian Anggaran Tahun 2021. Buku laporan ini disusun sebagai perwujudan dari akuntabilitas kelembagaan Pusat Kajian Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Hal utama yang ingin disampaikan dalam Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah bagaimana Pusat Kajian Anggaran melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan kegiatan untuk mendukung Program dukungan Keahlian Fungsi Dewan (khusus bidang anggaran kepada DPR RI) agar dapat memperkuat kelembagaan Badan Keahlian DPR RI sebagai organisasi pemberi dukungan keahlian.

Laporan Tahunan Pusat Kajian Anggaran 2021 yang telah disusun menggambarkan realisasi pencapaian kinerja anggaran dan pengelolaan sumber daya organisasi selama tahun anggaran 2021. Laporan Tahunan juga memaparkan berbagai permasalahan dan tantangan sekaligus rekomendasi untuk perbaikan tata kelola Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI di masa mendatang khususnya Tahun anggaran 2021.

Jakarta, Januari 2022

Kepala Pusat Kajian Anggaran

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE, M.Si



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A.Gambaran umum Pusat Kajian Anggaran.....	1
B.Dasar Hukum Pembentukan Pusat Kajian Anggaran.....	2
C.Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi.....	2
D. Permasalahan yang dihadapi.....	5
BAB II : PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	8
A.Ringkasan/ikhtisar Penetapan Kinerja.....	8
B.Ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja 2021.....	12
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A.Capaian Kinerja Organisasi.....	13
B.Realisasi Anggaran.....	23
BAB IV : PENUTUP.....	25
A.Kesimpulan.....	25
B.Rekomendasi.....	26
LAMPIRAN 1.....	27



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1	Struktur Organisasi Pusat Kajian Anggaran	4
Tabel 2	Perbandingan SDM Pusat Kajian Anggaran	5
Tabel 3	Pendidikan SDM Pusat Kajian Anggaran	6
Tabel 4	Perbandingan Anggaran dan Pegawai	6
Tabel 5	Perencanaan Kerja Output Pusat Kajian Anggaran Tahun 2021	9
Tabel 6	Perencanaan Kerja Output Pusat Kajian Anggaran Tahun 2021	10
Tabel 7	SOP Pusat Kajian Anggaran	11
Tabel 8	Perjanjian Kinerja Pusat Kajian Anggaran Tahun 2021	12
Tabel 9	Buletin APBN Tahun 2021	13
Tabel 10	Analisis APBN Tahun 2021	16
Tabel 11	Buku APBN Tahun 2021	17
Tabel 12	Referensi APBN Tahun 2021	17
Tabel 13	Jurnal Budget APBN Tahun 2021	17
Tabel 14	Laporan Pengumpulan Data Tahun 2021	18
Tabel 15	Analisis Ringkas Cepat (ARC) Tahun 2021	20
Tabel 16	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	20
Tabel 17	Perbandingan Realisasi Kinerja 2020 dan Realisasi Kinerja 2021	21
Tabel 18	Perbandingan Penyerapan DIPA TA. 2020 dan 2021	24
Tabel 19	Sasaran dan Realisasi	24
Gambar 1	Acara virtual apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas oleh KemenPAN-RB	23



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Tahun 2021, merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Selain itu, LAK ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi Pusat Kajian Anggaran. Dalam melaksanakan mandatnya, Pusat Kajian Anggaran telah menetapkan visi yaitu, **“Menjadi Organisasi Penyedia Kajian/Analisis APBN yang Profesional, Modern, dan Terpercaya”**. Dalam mencapai visi tersebut, Pusat Kajian Anggaran memiliki tugas dan fungsi yaitu sebagai unsur pendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI. Sementara Pusat Kajian Anggaran memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Terwujudnya tata Kelola dukungan kajian anggaran yang baik;
2. Terwujudnya penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang membentuk politik anggaran dewan;
3. Terwujudnya penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan;
4. Terwujudnya kelembagaan Pusat Kajian Anggaran dalam pembinaan jabatan fungsional Analis APBN yang professional.

Berdasarkan tujuan di atas, maka ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Pengelolaan dukungan kajian anggaran yang baik. Pusat Kajian Anggaran sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan diharuskan menjalankan reformasi birokrasi. Agenda reformasi yang harus dilaksanakan oleh Pusat Kajian Anggaran merupakan bagian dari Road Map Reformasi Birokrasi Badan Keahlian DPR RI yang di dalamnya memuat agenda kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk waktu dan nilai pencapaiannya.
2. Penyediaan produk Kajian APBN yang berkualitas dan tepat waktu. Keberadaan Pusat Kajian Anggaran dibentuk untuk memberikan dukungan keahlian kepada fungsi anggaran DPR RI. Untuk itu produk dukungan fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk penyediaan analisis APBN yang tetap waktu.
3. Penyediaan produk karya ilmiah APBN sebagai rujukan Produk karya ilmiah APBN yang dihasilkan Pusat Kajian Anggaran kedepan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Anggota Dewan dalam menjalankan fungsi anggaran.



4. Peningkatan profesionalitas Analis APBN. Analis APBN dalam menjalankan tugas dituntut mempunyai sikap yang profesional, untuk meningkatkan profesionalitas tersebut maka Pusat Kajian Anggaran perlu meningkatkan kemampuan Analis salah satunya dengan melakukan kegiatan diklat- diklat yang bersifat tematik sesuai dengan bidang kepakaran fungsional, agar mampu meningkatkan dukungan keahlian kepada DPR RI.

Kendala/hambatan dan Langkah-langkah antisipasi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut yang dihadapi Pusat Kajian Anggaran antara lain:

1. Masa Pandemi Covid-19. Dalam kondisi pandemi covid-19, tata kerja di Pusat Kajian Anggaran mengalami penyesuaian yang diatur dalam Surat Edaran (SE) No. 15538/SE-SEKJEN/2021 tentang Penyesuaian Kembali Sistem Kerja Pegawai Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
2. Sumber Daya Manusia. Jumlah Analis APBN Pusat Kajian Anggaran yang ideal sesuai dengan Analisa Beban Kerja adalah sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) orang, sedangkan jumlah existing yang ada saat ini 39 (tiga puluh delapan) Analis APBN. Jumlah tersebut diuraikan sebagai berikut Analis APBN 22 (dua puluh dua) orang dan Analis APBN PPNASN 16 (enam belas) orang, seharusnya Analis APBN seluruhnya diisi oleh Analis APBN.
3. Sarana dan Prasarana Kerja. Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien harus didukung oleh kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja yang memadai. Parameter yang dapat digunakan antara lain, proporsi jumlah SDM yang ada dengan sarana prasarana yang dibutuhkan, beban tugas, dan output yang dihasilkan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan saat ini antara lain komputer, laptop dan printer berwarna, termasuk di dalamnya pemenuhan data untuk kepentingan database.



BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Pusat Kajian Anggaran

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1) menyatakan bahwa DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya Pasal 69 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Melalui fungsi anggaran ini maka mempertegas kedudukan DPR RI untuk membahas, termasuk mengubah RAPBN dan menetapkan APBN yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Kedudukan DPR RI dalam hal penetapan APBN menjadi sentral, hal tersebut dikarenakan apabila DPR RI tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, maka Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu.

Dalam menjalankan fungsi anggaran DPR RI mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

1. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
2. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
3. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; dan
4. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang



Dengan memperhatikan tugas pokok fungsi DPR RI tersebut diatas, maka DPR RI membutuhkan supporting system yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI. Seiring dengan perubahan organisasi sistem pendukung maka seluruh dukungan keahlian yang sebelumnya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI akan dilaksanakan oleh Badan Keahlian DPR RI untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Pada Badan Keahlian DPR RI, pelaksanaan tugas dan fungsi untuk dukungan pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI dilaksanakan oleh Pusat Kajian Anggaran.

Pusat Kajian Anggaran mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang anggaran dalam penyusunan dan penetapan anggaran. Bentuk dukungan Pusat Kajian Anggaran meliputi penyediaan analisis dan referensi terkait APBN, analisis ringkas cepat sesuai dengan permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Anggota DPR RI serta dukungan pendampingan kepada AKD.

B. Dasar Hukum Pembentukan Pusat Kajian Anggaran

Pusat Kajian Anggaran secara resmi terbentuk setelah disahkannya Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal di atas, tugas Pusat Kajian Anggaran adalah mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perancangan APBN, adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran;
- Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran;
- Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian Anggaran;
- Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Kajian Anggaran;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pengkajian anggaran;



- Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran;
- Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran;
- Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran; dan,
- Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI.

Tabel 1. Struktur Organisasi Pusat Kajian Anggaran



D. Permasalahan yang dihadapi

1. Permasalahan utama yang dihadapi Pusat Kajian Anggaran antara lain:

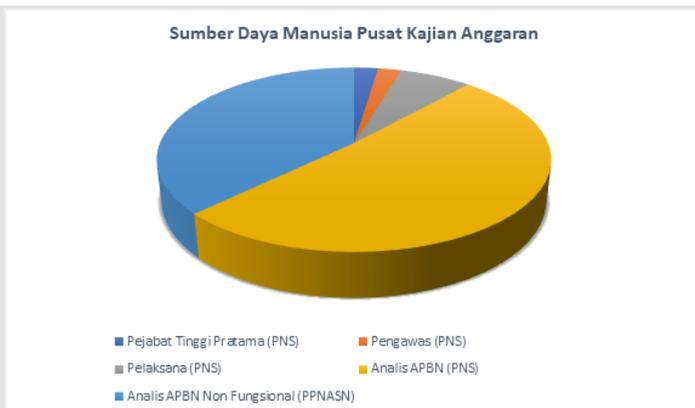
a. Ketatalaksanaan

Dalam kondisi pandemi Covid-19, tata kerja di Pusat Kajian Anggaran mengalami penyesuaian yang diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 15538/SE-SEKJEN/2021 tentang Penyesuaian Kembali Sistem Kerja Pegawai Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

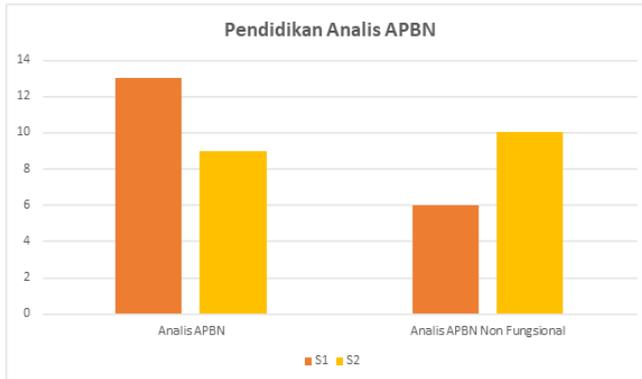
b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia Pusat Kajian Anggaran 44 (empat puluh empat) orang, terdiri dari Pejabat Tinggi Pratama 1 (satu) orang, Pengawas 1 (satu) orang, Pelaksana 3 (tiga) orang, Analis APBN 22 (dua puluh dua) orang dan 17 (tujuh belas) orang Pegawai Analis APBN Non Fungsional/Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara/PPNASN, adapun rincian jenis pegawai Pusat Kajian Anggaran dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan SDM Pusat Kajian Anggaran



Tabel 3. Pendidikan SDM Pusat Kajian Anggaran



Dilihat dari jumlah Sumber Daya Manusia di Pusat Kajian Anggaran secara kuantitas belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan analisis APBN kepada Dewan sehingga harus ditambah. Saat ini jumlah Analis APBN sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang, ini masih jauh dari jumlah ideal, dimana kebutuhan jumlah ideal Analis APBN untuk jangka panjang adalah sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) orang. Tahun 2021 Pusat Kajian Anggaran tidak menerima CPNS Analis APBN untuk itu diharapkan setiap tahun Pusat Kajian Anggaran mendapatkan CPNS Analis APBN.

c. Anggaran Pusat Kajian Anggaran Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Perbandingan Anggaran dan Pegawai

No	Keterangan	2020	2021
1	Anggaran	Rp3.875.836.000,-	Rp5.023.053.000,-
2	Pegawai	44	44



d. Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien harus didukung oleh kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja yang memadai. Parameter yang dapat digunakan antara lain, proporsi jumlah SDM yang ada dengan sarana prasarana yang dibutuhkan, beban tugas, dan output yang dihasilkan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan saat ini antara lain komputer, laptop dan tinta printer berwarna, termasuk di dalamnya pemenuhan data untuk kepentingan database.



BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Ringkasan/Ikhtisar Penetapan Kinerja

Tahun 2021 merupakan tahun ke-tujuh bagi Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI menjalankan tugas dan fungsinya. Hingga saat ini Pusat Kajian Anggaran masih perlu melakukan pembenahan, karena di satu sisi harus menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan keahlian kepada DPR RI secara optimal tetapi di sisi lain harus terus menata kelembagaannya agar dapat mencapai visinya, “Menjadi Organisasi Penyedia Kajian/Analisis APBN yang Profesional, Modern dan Terpercaya.”

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, sebagai bagian dari proses pencapaian akuntabilitas kinerja maka Pusat Kajian Anggaran perlu menyusun rencana kerja sebagai panduan arah kebijakan, strategi, dan target yang akan dicapai tahun 2022 serta kebutuhan penganggarannya.

Rencana kerja disusun sebagai bagian dari proses kesinambungan perencanaan strategis Pusat Kajian Anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keahlian DPR RI 2020-2024. Selanjutnya dalam Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran akan dijelaskan Arah Kebijakan, Strategi, Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja. Selanjutnya tema yang diangkat dalam rencana kerja Pusat Kajian Anggaran Tahun 2021 adalah mempertajam Analisis Politik Anggaran APBN.

Dukungan kajian anggaran yang dilakukan harus menghasilkan kajian-kajian APBN yang mampu memberikan rekomendasi bagi DPR RI dalam memperbaiki sisi alokasi, distribusi dan stabilisasi APBN. Selanjutnya DPR RI dapat memanfaatkan hasil-hasil analisis APBN tersebut dalam menjalankan fungsi anggarannya. Output dari Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran untuk tahun 2021 adalah analisis/referensi/laporan/brief APBN. Adapun indikator kinerja diukur melalui: jumlah bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran dan jumlah analisis/referensi/laporan APBN, target kinerja Pusat Kajian Anggaran dapat dilihat pada tabel 5.



Tabel 5. Perencanaan Kerja Output Pusat Kajian Anggaran Tahun 2021

Target dalam Perjanjian Kinerja (PK)	2021
Indikator Kinerja	Target
Satker Setjen	
051. Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran	
Perjanjian Kinerja (PK) 4 Kebijakan Pusat Kajian Anggaran	
Rencana Kerja Tahunan	1
Rencana Kerja dan Anggaran	1
Laporan Kinerja	1
Dokumen Kebijakan Lainnya	1
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK)	4
052. Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN	
Perjanjian Kinerja (PK) 41 Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN	
Jurnal	2
Buletin APBN/ ARC	24
Buku Terkait APBN	5
Analisis Disesuaikan Siklus	14
Referensi	5
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK)	50
Non Perjanjian Kinerja (PK)	
Laporan Pengumpulan Data Ke Daerah	21
Seminar Luar Kota	-
Budget Issue Brief	22
Paket Meeting Kopo	5
Jumlah Non Perjanjian Kinerja (PK)	48
TOTAL DOKUMEN PKA	102

Adapun target dari masing-masing indikator tersebut adalah:

- 1.Target kinerja utama (cascading) dari Bahan Kebijakan ditetapkan sebanyak 4 (empat) laporan, yaitu; Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Kinerja dan Dokumen kebijakan Lainnya.
- 2.Target kinerja utama (cascading) dari Target Analisis/ Referensi/ Laporan APBN adalah sebanyak 50 (lima puluh) produk yang terdiri dari Jurnal, buletin APBN/ARC, Buku APBN, analisis, APBN, referensi, sementara untuk target kinerja tambahan (noncascading) ditetapkan 48 (empat puluh delapan) output yaitu laporan pengumpulan data ke daerah, Budget Issue Brief dan paket meeting Kopo.



Tabel 6. Perencanaan Kerja Output Pusat Kajian Anggaran Tahun 2021

Target dalam Perjanjian Kinerja (PK)	2021	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Indikator Kinerja	Target												
Satker Setjen													
051. Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran													
Perjanjian Kinerja (PK) 4 Kebijakan Pusat Kajian Anggaran													
Rencana Kerja Tahunan	1	1											
LAKIP	1		1										
Anggaran	1		1										
Dokumen Lainnya	1				1								
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK)	4	1	2		1								
Target dalam Perjanjian Kinerja (PK)													
Indikator Kinerja	Target	Target											
052. Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN													
Perjanjian Kinerja (PK) 50 Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN													
Jurnal	2						1					1	
Buletin APBN/ ARC	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Buku Terkait APBN	5					1					2	2	
Analisis Disesuaikan Siklus	14				2	4		2	3	3			
Referensi	5					3				2			
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK)	50												
Non Perjanjian Kinerja (PK)													
Laporan Pengumpulan Data Ke Daerah	21		4	8	7		1				1		
Budget Issue Brief	22		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Paket Meeting Kopo	5			2	1			1					1
Jumlah Non Perjanjian Kinerja (PK)	48												
TOTAL DOKUMEN PKA	102												

Pada Tahun 2021 ditetapkan output perumusan kebijakan sebanyak 4 (empat) output, dalam pelaksanaannya telah dihasilkan 4 (empat) output bahan kebijakan Pusat Kajian. Dengan demikian pencapaian adalah 100 persen, adapun output yang dimaksudkan adalah: Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Kinerja dan Dokumen Kebijakan Lainnya, dan untuk memudahkan pencapaian target maka untuk tahun 2021 disusun Perencanaan Kerja (Renja) output per bulannya.



SOP Pusat Kajian Anggaran tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. SOP Pusat Kajian Anggaran

NO	SOP Analisis APBN	SOP Tata Usaha
1	SOP Pemanggilan Pakar	SOP Surat Masuk
2	SOP Penyusunan Analisis	SOP Surat Keluar
3	SOP Penyusunan Referensi	SOP Penggunaan Anggaran Jamuan
4	SOP Penyusunan Analisis Ringkas Cepat (ARC)	SOP Penggunaan Anggaran Narasumber
5	SOP Penerbitan Buletin APBN	SOP Penggunaan Anggaran Pencetakan
6	SOP Penulisan Buku APBN	SOP Pertanggungjawaban Anggaran SPPD
7	SOP Penerbitan Jurnal Budget APBN	SOP Penggunaan Anggaran SPPD
8	SOP Kunjungan Kerja Ke Luar Negeri	SOP Usulan Anggaran
9	SOP Pendampingan Ke Alat Kelengkapan Dewan	SOP Usulan Revisi Anggaran
10	SOP Pendokumentasian Hasil Kerja	SOP Penyusunan Rencana Strategis
11	SOP Pengumpulan Data Dalam Kota/Pembelian Data	SOP Penyusunan LAK
12	SOP Pengumpulan Data Ke Daerah	
13	SOP Penyelenggaraan Workshop	
14	SOP Rapat Internal	
15	SOP Menghadiri Seminar Dalam dan Luar Kota	
16	SOP Penyusunan Budget Issue Brief	



B. Ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Penetapan Perjanjian Kinerja Pusat Kajian Anggaran sebagai program strategis Pusat Kajian Anggaran akan direalisasikan pada akhir tahun 2021, adapun perjanjian kerja Pusat Kajian Anggaran dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Perjanjian Kinerja
Pusat Kajian Anggaran Tahun 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas kajian dalam penyusunan dan penetapan anggaran dengan pelaksanaan fungsi Anggaran DPR	1. Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Kajian Anggaran 3. Persentase penyerapan anggaran Pusat Kajian Anggaran	100% 3.00% 95%
	Program	Anggaran	
	Penyusunan Kajian APBN	Rp5.334.720.000,-	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk mendukung pelaksanaan Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan, pada Tahun 2021 Pusat Kajian Anggaran menyusun berbagai rencana kegiatan yang dituangkan dalam Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran. Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran terbagi dalam dua sub kegiatan yaitu: Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran dan Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan APBN.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun 2021 ditetapkan output utama Analisis sebanyak 50 output. Dalam pelaksanaannya telah dihasilkan 50 output Kajian sehingga pencapaian adalah 100 persen. Adapun output Penyusunan analisis/referensi/laporan APBN yang terdiri dari:

1. Buletin sebanyak 24:

Tabel 9. Buletin APBN Tahun 2021

NO	BULAN	JUDUL
1	Vol. VI / No. 1 – Januari	Mengurai Ketergantungan Kedelai Impor di Indonesia
		Optimalisasi dan Permasalahan Fasilitas Perpajakan di Kawasan Ekonomi Khusus
		Permasalahan Subsidi Pupuk di Indonesia
2	Vol. VI / No. 2 – Februari	Fleksibilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Mengatasi Permasalahan Pendidikan di Tengah Pandemi
		Di Balik Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia
		Potensi dan Tantangan Pembiayaan Infrastruktur Melalui Surat Berharga Syariah Negara
3	Vol. VI / No. 3 - Maret	Tantangan Sarana
		Prasarana Perpustakaan dalam Peningkatan Literasi
		Dilema Defisit APBN Serta Solusi Mengatasinya
4	Vol. VI / No. 4 - Maret	Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar: Kebijakan Refocusing Anggaran untuk Prioritas Nasional
		Pembentukan Holding BUMN Pangan: Agar Optimal Berkaca dari Holding Perkebunan
		Menjawab Tantangan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19
5	Vol. VI / No. 5 - Maret	Arah Muatan dalam Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat
		Tantangan Pelaksanaan Kebijakan KUR Super Mikro Bagi Alumni Kartu Prakerja



		Permasalahan Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal dalam Sislognas Desa Wisata Untuk Pariwisata yang Berkelanjutan
6	Vol. VI / No. 6 - April	Potensi dan Tantangan Indonesia Menuju Sentra Industri Halal Dunia Dampak Kebijakan Pengurangan Diskon Listrik Tantangan dalam Pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle)
7	Vol. VI / No. 7 - April	Potensi Menjanjikan Pendapatan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Dinamika Industri Farmasi: Setengah Dekade Pasca Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional Memaksimalkan Iklim Investasi dari Perjanjian IK-CEPA
8	Vol. VI / No. 8 - Mei	Dilema Kebijakan Harmonisasi Struktur Tarif Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) Meninjau Pelaksanaan PEN dalam Menekan Angka Pengangguran Tantangan Pengembangan Industri Pertahanan Dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara
9	Vol. VI / No. 9 - Mei	Tantangan Pemulihan Ekonomi 2022 Melalui Peningkatan Daya Beli Masyarakat Optimalisasi Potensi Peternakan Sapi Potong di Indonesia Tantangan Program Pengembangan Kampung Nelayan Maju
10	Vol. VI / No. 10 - Juni	Meninjau Wealth Tax Sebagai Solusi Pemerataan Kekayaan dan Pemulihan Ekonomi Di Balik Kebijakan Relaksasi Ekspor dan Hilirisasi Mineral Logam Perkembangan dan Tantangan Hilirisasi Batubara
11	Vol. VI / No. 11 - Juni	Government to Person (G2P) Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial di Indones Teknologi Blockchain dan Potensinya Pentingnya Reformasi Data Bagi Reformasi Perlindungan Sosial
12	Vol. VI / No. 12 - Juli	Pro Kontra Penerapan PPN Jasa Pendidikan Tantangan Taper Tantrum di Tengah Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional Solusi Overcrowded Lapas/Rutan Di Indonesia
13	Vol. VI / No. 13 - Juli	Optimalisasi Lumbung Ikan Nasional Di Provinsi Maluku Menimbang Penerapan PPN Bahan pokok Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Dalam Mendukung Percepatan Penanganan Stunting
14	Vol. VI / No. 14 - Agustus	Optimalisasi Imbal Dagang Sebagai Strategi Peningkatan Ekspor Pengoptimalan Fasilitas untuk Mendorong Partisipasi Ekonomi Penyandang Disabilitas Inisiasi Regenerasi Petani
15		Dana Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Sektor Pariwisata

	Vol. VI / No. 15 – Agustus	Evaluasi Kinerja Belanja Daerah dalam Penanganan Covid-19 Semester I Tahun 2021 Meninjau Kinerja LMAN dalam Pendanaan Pengadaan Lahan Proyek Strategis Nasional
16	Vol. VI / No. 16 – September	Rumah Produksi Bersama: Tantangan Penyediaan Akses Bahan Baku (Studi Kasus Industri Rota) Kebijakan Bantuan Subsidi Upah Tahun 2021 Catatan Atas Ketimpangan di Era Otonomi Daerah
17	Vol. VI/No. 17 - September	Menilik Usulan Cukai Minuman Berpemanis Permasalahan Dalam Peningkatan Utilisasi Palapa Ring Meninjau Project Laptop Merah Putih
18	Vol. VI/No. 18 - September	Kemandirian Fiskal Daerah dalam Era Otonomi Kesepakatan Perdagangan IUAE-CEPA: Potensi dan Tantangan Kendala Perizinan Komersial/Operasional pada IKM Pangan
19	Vol. VI/No. 19 - Oktober	Meninjau Digitalisasi UMKM Potensi dan Problematika Menjaga Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara Potensi dan Tantangan Pengelolaan Blok Wabu
20	Vol. VI/No. 20 - Oktober	Upaya Mewujudkan Swasembada Gula Nasional Bunga Utang yang Mulai Mengkhawatirkan Dinamika Satu Dekade Dana Otonomi Khusus Aceh
21	Vol. VI/No. 21 - November	Perbaikan Neraca Dagang Melalui Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor Evaluasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor Kehutanan Evaluasi Pelaksanaan BLT-Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19
22	Vol. VI/No. 22 - November	Pengembangan Industri CPO untuk Meningkatkan Daya Saing Ekspor Pengoptimalan Program Pengungkapan Sukarela pada Wajib Pajak Tantangan Investasi Hilir Minyak dan Gas (Migas)
23	Vol. VI/No. 23 - Desember	Tinjauan Bantuan Subsidi Upah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS Transformasi Digital Perbankan dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Progres dan Evaluasi Pembangunan Jalan Trans Papua
24	Vol. VI/No. 24 - Desember	Tantangan dan Strategi UKM dalam Menyongsong Pemberlakuan RCEP 2022 Optimalisasi Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional Solusi Dua Pilar Pajak Digital dan Konsekuensinya Terhadap Indonesia



2. Analisis dan infografis sebanyak 14 (empat belas):

Tabel 10. Analisis APBN Tahun 2021

NO	JENIS PRODUK	JUDUL
1	Analisis dan Infografis No.01/an.PKA/PP/VI/2021	Optimalisasi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
2	Analisis dan Infografis No.02.PKA/PP/VI/2021	Tinjauan Kritis Produksi Padi Nasional
3	Analisis dan Infografis No.03/an.PKA/PP/VI/2021	Tantangan Bantuan Sosial sebagai bagian Extraordinary Policy Responses dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
4	Analisis dan Infografis No.04/an.PKA/PP/VI/2021	DAK Fisik Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Target Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak
5	Analisis dan Infografis No.05/an.PKA/Lapsem/VII/2021	Penyerapan Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
6	Analisis dan Infografis No.06/an.PKA/Lapsem/VII/2021	Tantangan Transformasi Subsidi Energi
7	Analisis dan Infografis No.07/an.PKA/APBN/IX/2021	Prospek Perekonomian Indonesia dan Catatan Kritis Atas Kebijakan Fiskal Tahun 2022
8	Analisis dan Infografis No. 08/an.PKA/APBN/IX/2021	Kinerja Industri Pengolahan dan Catatan Kritis Strategi Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan 2022
9	Analisis APBN dan Infografis No. 09/an.PKA/APBN/IX/2021	Perkembangan dan Catatan Kritis Pelaksanaan Penyediaan Layanan Tol Laut Bersubsidi
10	Analisis APBN dan Infografis No. 10/an.PKA/APBN/IX/2021	Desain dan Tantangan Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM
11	Analisis APBN dan Infografis No. 11/an.PKA/APBN/IX/2021	Reformasi Pendidikan: Pembelajaran Digital di Indonesia
12	Analisis APBN dan Infografis No. 12/an.PKA/APBN/IX/2021	Transformasi Balai Latihan Kerja Demi Signifikansi Efektivitas Penyerapan Tenaga Kerja di Era Industri 4.0
13	Analisis APBN dan Infografis No. 13/an.PKA/APBN/IX/2021	Tantangan Penguatan Keamanan Siber dalam M enjaga Stabilitas Keamanan
14	Analisis APBN dan Infografis No. 14/an.PKA/APBN/IX/2021	Potensi dan Tantangan Optimalisasi PNBPN Bidang Spektrum Frekuensi Radio dalam Era Transformasi Digital



3. Buku sebanyak 5 (lima):

Tabel 11. Buku Tahun 2021

NO	JUDUL
1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Dari Masa Ke Masa Sejak Pascareformasi
2	Bunga Rampai UMKM dan APBN
3	Bunga Rampai Sektor Pertanian dan APBN
4	Isu-isu Strategis Otonomi Daerah dalam Perspektif Anggaran
5	Program Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19

4. Referensi sebanyak 5 (lima):

Tabel 12. Referensi Tahun 2021

NO	JENIS PRODUK	JUDUL
1	Referensi 01/ref.PKA/APBN/IX/2021	Perkembangan PMDN dan PMA di Indonesia Tahun 2016-2020
2	Referensi 02/ref.PKA/APBN/IX/2021	Potret Industri Pertahanan Indonesia
3	Referensi 03/ref.PKA/APBN/IX/2021	Peta Politik Keamanan dan Perekonomian Nasional serta Daerah
4	Referensi 04/ref.PKA/APBN/IX/2021	Perkembangan Indikator Pendidikan sebagai Dukungan PN 3: Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
5	Referensi 05/ref.PKA/APBN/IX/2021	Perkembangan Anggaran dan Indikator Kesehatan Indonesia Menuju SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Tabel 13. Jurnal Budget APBN Tahun 2021

5. Jurnal Budget APBN sebanyak 2 (dua):

NO	JENIS PRODUK	JUDUL
1	Jurnal Volume 6 Edisi 1 (Juni 2021)	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Kritis terhadap Implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Analisis Hubungan Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Konsumsi Energi, dan Emisi CO₂ di Indonesia pada Periode 1980 – 2019 Implikasi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah terhadap Keuangan Negara dan Keuangan Daerah

		<ul style="list-style-type: none"> Elastisitas Penerimaan Asli Daerah (PAD) di Indonesia pada Era Otonomi Daerah Studi Hubungan Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dengan Pertumbuhan Ekonomi Analisis Dampak Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat terhadap IPM Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, serta Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonom Analisis Rasio Pendapatan dan Akreditasi pada Badan Layanan Umum Pendidikan Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Mengatasi Inflasi di Indonesia Periode 1984 – 2019 Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Variabel Belanja Modal sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintahan Provinsi Tahun 2015 - 2019
2	Jurnal Volume 6 Edisi 2 (November 2021)	<ul style="list-style-type: none"> Keterkaitan antara Rumah Tangga Penerima Manfaat BLT dan Tingkat Konsumsi Pangan: Temuan dari Indonesia Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor-sektor Pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Kabupaten Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 – 2019 Daya Saing Karet Indonesia di Pasar ASEAN Sebelum dan Sesudah Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN Evaluasi Kritis Perusahaan Listrik Negara (Persero) terhadap Kebijakan Subsidi Listrik Disparitas Pembangunan Ekonomi Indonesia Analisis Shift Share pada Wilayah Terdampak Pandemi di Indonesia Masalah dan Kendala Dukungan APBN dalam Sektor Pertanian: Telaah

Sementara untuk target kinerja tambahan (noncascading) berupa penyelenggaran database pengumpulan data lapangan ke daerah dilakukan 21 (dua puluh satu) kegiatan/laporan sedangkan untuk kegiatan seminar tidak dilakukan untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 14:

Tabel 14. Laporan Pengumpulan Data Tahun 2021

NO	LAPORAN/KEGIATAN	DAERAH	WAKTU
1	Pencarian Data tentang Pandemi Covid-19 dan Pertanian: Dampak dan Respon Kebijakan Pemerintah	Purwakarta, Jawa Barat	17 – 19 Feb 2021
2	Pencarian Data tentang Penguatan UMKM dalam Menopang Perekonomian Nasional	Bandung, Jawa Barat	17 – 19 Feb 2021



3	Pencarian Data Penguatan UMKN dalam Menopang Perekonomian Nasional	Bandung, Jawa Barat	17 – 19 Feb 2021
4	Pengumpulan Data ke Daerah Kab. Karawang, Jawa Barat	Karawang, Jawa Barat	25 – 27 Feb 2021
5	Pencarian Data tentang Pandemi Covid-19 dan Pertanian: Dampak dan Respon Kebijakan Pemerintah	Serang, Banten	9 – 11 Mar 2021
6	Pencarian Data tentang Penguatan UMKM dalam Menopang Perekonomian Nasional	Serang, Banten	9 – 11 Mar 2021
7	Pencarian Data tentang Penguatan UMKM dalam Menopang Perekonomian Nasional	Kota Tangerang, Banten	9 – 11 Mar 2021
8	Pencarian Data tentang Penguatan UMKM dalam Menopang Perekonomian Nasional	Kota Tangerang, Banten	9 – 11 Mar 2021
9	Pencarian Data tentang Kemandirian Ekonomi Daerah dalam Era Otonomi Daerah	Kota Tangerang, Banten	3 – 5 Mar 2021
10	Pencarian Data tentang Analisis Kebijakan Fleksibilitas Penganggaran Pemerintah Pusat dan Daerah pada Kondisi Luar Biasa di Era Otonomi Daerah	Kota Tangerang, Banten	3 – 5 Mar 2021
11	Pencarian Data tentang Kesiapan Transformasi Balai Latihan Kerja Demi Signifikansi Efektivitas Penyerapan Tenaga Kerja di Era Industri 4.0	Kota Serang, Banten	9 – 12 Mar 2021
12	Pengumpulan Data ke Kota Bogor dalam rangka Analisis Isu-isu Strategis Otonomi Daerah dalam Perspektif Anggaran Studi Kasus Kota Bogor	Bogor, Jawa Barat	23 – 26 Mar 2021
13	Pengumpulan Data ke Kota Bekasi tentang Kesiapan Transformasi Balai Latihan Kerja Demi Signifikansi Efektivitas Penyerapan Tenaga Kerja di Era Industri 4.0	Kota Bekasi, Jawa Barat	8 – 10 Apr 2021
14	Pengumpulan Data ke Kota Bogor dan Kab. Bogor tentang Kesiapan Transformasi Balai Latihan Kerja Demi Signifikansi Efektivitas Penyerapan Tenaga Kerja di Era Industri 4.0	Bogor, Jawa Barat	8 – 10 Apr 2021
15	Pengumpulan Data ke Kota Bogor tentang Penguatan UMKM dalam Menopang Perekonomian Nasional	Bogor, Jawa Barat	8 – 10 Apr 2021
16	Pengumpulan Data ke Kabupaten Bogor tentang Pandemi Covid-19 dan Pertanian: Dampak dan Respon Kebijakan Pemerintah	Bogor, Jawa Barat	8 – 10 Apr 2021
17	Pengumpulan Data ke Kota Depok tentang Penguatan UMKM dalam Menopang Perekonomian Nasional	Kota Depok, Jawa Barat	15 – 17 Apr 2021
18	Pencarian Data tentang Analisis Isu-isu Strategis Otonomi Daerah dalam Perspektif Anggaran: Studi Kasus Kota Bekasi	Kota Bekasi, Jawa Barat	21 – 23 Apr 2021
19	Pencarian Data tentang Penguatan UMKM dalam Menopang Perekonomian Nasional	Bandung, Jawa Barat	27 – 29 Apr 2021



20	Pengumpulan Data ke Kabupaten Bogor dalam rangka Analisis Isu-isu Strategis Otonomi Daerah dalam Perspektif Anggaran Studi Kasus Kabupaten Bogor	Bogor, Jawa Barat	16 – 18 Jun 2021
21	Pengumpulan Data ke Kabupaten Bogor tentang Menilik Perkembangan Peran Pemerintah Daerah dalam Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) demi Bantuan Sosial Tepat Sasaran	Bogor, Jawa Barat	12 – 14 Okt 2021

Dalam kategori analisis juga dihasilkan Analisa Ringkas Cepat (ARC) yaitu analisis yang sifatnya pendek dan membutuhkan penyelesaian dalam waktu yang singkat, produk ini dibuat didasarkan pada permintaan. Jumlah Analisis Ringkas Cepat (ARC) selama tahun 2021 dihasilkan sebanyak 16 (enam belas) analisis dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15. Analisis Ringkas Cepat (ARC) Tahun 2021

NO	Analisis Ringkas Cepat (ARC)
1	Tinjauan Singkat Dana Desa Tahun 2015 – 2020
2	UMKM: Perkembangan dan Dukungan Pemerintah Melalui APBN
3	Dukungan APBN Terhadap Sektor Pertanian
4	Alternatif Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Indonesia

Terkait target dan realisasi kinerja tahun 2021, berikut disajikan perbandingan perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan realisasi kinerja tahun 2021, analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau meningkat/menurunnya serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan juga analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel 16:

Tabel 16. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Target dalam Perjanjian Kinerja (PK)	Target 2021	Realisasi 2021
Indikator Kinerja		
Satker Setjen		
051. Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran		
Perjanjian Kinerja (PK) 4 Kebijakan Pusat Kajian Anggaran		
Rencana Kerja Tahunan	1	1
Rencana kerja dan Anggaran	1	1
Laporan Kinerja	1	1
Dokumen Kebijakan Lainnya	1	1
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK)	4	4



052. Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN		
Jurnal	2	2
Buletin APBN/ ARC	24	24
Buku Terkait APBN	5	5
Analisis Disesuaikan Siklus	14	14
Referensi	5	5
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK) 41 Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN	50	50
Laporan Pengumpulan Data Ke Daerah*	21	21
Budget Issue Brief	22	22
Paket Meeting Kopo	5	5
Jumlah Non Perjanjian Kinerja (PK)	48	48
TOTAL DOKUMEN PKA	102	102

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja 2020 dan Realisasi 2021

Target dalam Perjanjian Kinerja (PK)	Realisasi 2020	Target dalam Perjanjian Kinerja (PK)	Realisasi 2021
Indikator Kinerja		Indikator Kinerja	
Satker Setjen		Satker Setjen	
051. Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran		051. Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran	
Perjanjian Kinerja (PK) 4 Kebijakan Pusat Kajian Anggaran		Perjanjian Kinerja (PK) 4 Kebijakan Pusat Kajian Anggaran	
Rencana Kerja Tahunan	1	Rencana Kerja Tahunan	1
Rencana Kerja dan Anggaran	1	Rencana Kerja dan Anggaran	1
Laporan Kinerja	1	Laporan Kinerja	1
Dokumen Kebijakan Lainnya	1	Dokumen Kebijakan Lainnya	1
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK)	4	Jumlah Perjanjian Kinerja (PK)	4
052. Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN		052. Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN	
Jurnal	2	Jurnal	2
Buletin APBN/ ARC	18	Buletin APBN/ ARC	24
Buku Terkait APBN	4	Buku Terkait APBN	5
Analisis Disesuaikan Siklus	13	Analisis Disesuaikan Siklus	14
Referensi	4	Referensi	5
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK) 41 Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN	41	Jumlah Perjanjian Kinerja (PK) 50 Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN	50



Laporan Pengumpulan Data Ke Daerah*	5	Laporan Pengumpulan Data Ke Daerah*	21
Laporan Pemodelan Ekonomi	-	Budget Issue Brief	-
Laporan Pengembangan Profesi	2	Laporan Pengembangan Profesi	-
Laporan Workshop	-	Paket Meeting	5
Jumlah Non Perjanjian Kinerja (PK)	7	Jumlah Non Perjanjian Kinerja (PK)	48
	52	TOTAL DOKUMEN PKA	102

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat perbedaan target perjanjian kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, akan tetapi target dapat dicapai 100 persen, target Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Kajian Anggaran tahun 2021 terkait meningkatnya kualitas analisis/laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI tercapai 100%, sedangkan indeks kepuasan Anggota DPR RI atas kualitas terbitan (buku, jurnal ilmiah, info singkat, buletin APBN target 3.00% dan tercapai 3.20% sedangkan dari sisi penyerapan anggaran target 90% dan tercapai 99,86 % jika dilihat target melebihi hal tersebut dikarenakan Pusat Kajian Anggaran selalu melakukan evaluasi kegiatan.

6. Capaian Zona Integritas

Zona integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public.

Penilaian predikat tersebut dilakukan oleh KemenPAN & RB yang berpedoman pada PermenPAN & RB nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dan juga sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 208/SEKJEN/2021 Tanggal 15 Januari 2021. Unit kerja yang diusulkan ada 5 (lima) yaitu:

1. Biro Persidangan II;
2. Pusat Kajian Anggaran;

3. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat;
4. Biro Kesekretariatan Pimpinan
5. Pusat Perancangan Peraturan Perundang-undangan

Dari 5 (lima) unit tersebut, Biro Persidangan II dan Pusat Kajian Anggaran berhasil meraih penghargaan zona integritas sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Biro Persidangan II dan Pusat Kajian Anggaran berhasil memenuhi enam era perubahan program Reformasi Birokrasi dan pencegahan KKN pada unit kerja meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Gambar 1. Acara virtual apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas oleh KemenPAN-RB



B. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kajian Anggaran selama tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp5.023.053.000,- yang terdiri dari: Anggaran kegiatan Perumusan Kebijakan sebesar Rp2.404.727.000,- dan anggaran kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan APBN sebesar Rp2.618.326.000,- Adapun realisasinya adalah sebesar Rp5.015.974.350 atau mencapai 99,86 persen rincian lebih lanjut dijelaskan pada sub-sub bagian berikut.



1. Realisasi Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan. Anggaran kegiatan Perumusan Kebijakan dialokasikan sebesar Rp2.404.727.000,- tetapi dalam pelaksanaannya yang terealisasi sebesar Rp2.401.679.750,-
2. Realisasi Anggaran Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan APBN. Anggaran kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan APBN dialokasikan sebesar Rp2.618.326.000,- tetapi dalam pelaksanaannya yang terealisasi sebesar Rp2.614.294.600,-

Tabel 18. Perbandingan Penyerapan DIPA TA. 2020 dan 2021

Keterangan	TA 2020	TA 2021
DIPA	Rp3.875.836.000	Rp5.023.053.000
Penyerapan	Rp3.832.120.200	Rp5.015.974.350
%	98,87 persen	99,86 persen

Tabel 19. Sasaran dan Realisasi

PUSAT KAJIAN ANGGARAN			
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas kajian dalam penyusunan dan penetapan anggaran terkait dengan pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI	Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100%	100%
	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Kajian Anggaran	3,00	3,20
	Persentase penyerapan anggaran Pusat Kajian Anggaran	95%	99,86%



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan pertanggungjawaban kinerja Pusat Kajian Anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2021. Disamping itu, juga mencerminkan sejauh mana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah diimplementasikan.

Tahun 2021 Pusat Kajian Anggaran melaksanakan 2 (dua) program yaitu: (1) Perumusan Kebijakan; dan (2) Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan APBN. Secara umum, kinerja Pusat Kajian Anggaran telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian realisasi anggaran sebesar 99,86%.

Sementara itu, permasalahan yang ada di Pusat Kajian Anggaran masih hampir sama pada tiap tahunnya. Pada aspek sumber daya manusia untuk jangka panjang secara keseluruhan masih kurang jumlah yang ideal berdasarkan Analisis Beban Kerja adalah sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) Analis APBN. Dengan jumlah yang ideal diharapkan pelayanan di bidang anggaran kepada Anggota Dewan dapat lebih maksimal, jumlah tersebut akan lebih ideal kalau tercukupi dengan Pegawai Negeri Sipil.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pada aspek sarana dan prasarana kerja, permasalahan mendasar adalah kurangnya sarana kerja seperti komputer/laptop, printer, tinta printer berwarna termasuk didalamnya pemenuhan akses data untuk kepentingan database.



B. Rekomendasi

Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal dan eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut evaluasi. Keberhasilan Pusat Kajian Anggaran dalam mencapai target kinerja yang mendekati target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 merupakan wujud keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen bersama seluruh pihak pada Pusat Kajian Anggaran untuk bekerja sama mewujudkan target kinerja, mengingat kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI tidak menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal saja melainkan satu gabungan kontribusi dari semua pihak yang terkait.

Keberhasilan yang sudah dicapai oleh Pusat Kajian Anggaran harus terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya, dan hal ini merupakan tantangan bagi Pusat Kajian Anggaran untuk bisa menjadi lebih baik. Untuk itu, langkah-langkah antisipatif perlu dilakukan antara lain:

1. Diharapkan adanya dukungan dari Kepala Badan Keahlian Dewan dan Sekjen DPR RI dalam hal Penambahan pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil;
2. Diharapkan adanya dukungan dari Sekjen DPR RI dalam hal penambahan anggaran;
3. Diharapkan adanya dukungan dari Sekjen DPR RI sarana kerja seperti komputer/laptop, printer dan tinta printer berwarna, selain itu diperlukan juga akses data untuk keperluan Analis APBN.
4. Untuk meningkatkan Kompetensi Analis APBN, perlu dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan ToT dan ToF, Ekonometri dan Keuangan Negara, Penyusunan Infografis atau Design grafis, Pelatihan Regulatory Impact Assessment, Government Spending Analysis, Performance Based Budgeting and Budget Planning, Public Expenditure Review, Pelatihan Struktural Equation Model (SEM), Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Populer.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait, atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja Analis APBN dan pada organisasi Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI.



LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA PUSAT KAJIAN ANGGARAN TAHUN 2021



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAL. SENEWATI, GAYUTI SUBERTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE: www.dpr.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Asep Ahmad Saefullah, S.E., M.Si.
Jabatan : Kepala Pusat Kajian Anggaran

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Inosenbus Samsud, S.H., M.Hum
Jabatan : Kepala Badan Keahlian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Inosenbus Samsud, S.H., M.Hum.
NIP. 195507101990031007

Jakarta, 02 Januari 2021
Pihak Pertama,

Dr. Asep Ahmad Saefullah, S.E., M.Si.
NIP. 197109111997031005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas kajian dalam penyusunan dan penetapan anggaran terkait dengan pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR	1. Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Kajian Anggaran 3. Persentase penyerapan anggaran Pusat Kajian Anggaran	100% 3,00 95%
Program		Anggaran	
Penyusunan Kajian APBN		Rp5.334.720.000,-	

Kepala Badan Keahlian,

Dr. Inosenbus Samsud, S.H., M.Hum.
NIP. 195507101990031007

Jakarta, 02 Januari 2021
Kepala Pusat Kajian Anggaran,

Dr. Asep Ahmad Saefullah, S.E., M.Si.
NIP. 197109111997031005